



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  
BUMN, DAN INVESTASI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	14 (empat belas)
Hari/Tanggal	:	Senin, 10 Juli 2017
W a k t u	:	Pukul 10.40 s.d 13.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD); didampingi oleh: 1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra)
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	1. Membahas RKA K/L dan RKP Tahun 2018. 2. Membahas RKA K/L dalam RUU APBNP TA 2017. 3. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016.
Hadir	:	31 dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dibuka pada pukul 10.40 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini Senin 10 Juli 2017 dalam rangka:
  - 1) Membahas RKA K/L dan RKP Tahun 2018.
  - 2) Membahas RKA K/L dalam RUU APBNP TA 2017.
  - 3) Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan Menteri Koperasi dan UKM RI untuk menjelaskan RKA K/L dan RKP Tahun 2018, RKA K/L dalam RUU APBNP TA 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016 Kementerian Koperasi dan UKM RI.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas RKA K/L dan RKP Tahun 2018, RKA K/L dalam RUU APBNP TA 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016 Kementerian Koperasi dan UKM RI.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp.250.993.106.244,- (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar 25,84% dari alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 971.273.348.000,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI belum dapat memahami penghematan dari efisiensi Belanja Barang Kementerian Koperasi dan UKM RI sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, sebesar Rp. 10.500.000.000,- (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), sehingga alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp. 960.773.348.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), dan selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
3. Komisi VI DPR RI tidak dapat memahami Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan Nomor : S-398/MK.02/2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas Nomor B-193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 sebesar Rp. 963.850.598.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) termasuk didalamnya anggaran Dewan Koperasi Indonesia sebesar Rp. 14.325.000.000,- (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), dan selanjutnya Komisi VI DPR RI mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR RI untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
4. Komisi VI DPR RI mendukung Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2018 untuk belanja langsung ke masyarakat yang mendukung Program Prioritas Nasional tahun 2018. Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri Koperasi dan UKM RI agar program prioritas tahun 2018 lebih mengutamakan untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM sesuai Program Nawacita Presiden Jokowi dan untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan Efisiensi Nasional yang berdaya saing tinggi sesuai Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
5. Komisi VI DPR RI dapat memahami kendala yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam merealisasikan alokasi anggaran 2016. Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya, langkah dan strategi yang dilakukan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.956.784.284.430,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*) atau 93,97% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.018.202.983.000,- (*Satu Triliun Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*), dan selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.20 WIB.